

**TATA KELOLA PERSAMPAHAN DI KECAMATAN SOMBA OPU**

**KABUPATEN GOWA**

**NURUL ASFIRAH**

**Nomor Stambuk : 105640164012**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

**TATA KELOLA PERSAMPAHAN DI KECAMATAN SOMBA OPU**

**KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan di Ajukan Oleh

**NURUL ASFIRAH**

Nomor Stambuk : 105640164012

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

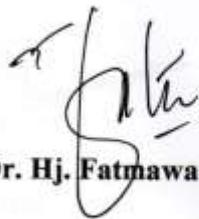
**2017**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Persampahan di Kecamatan Somba Opu  
Kabupaten Gowa  
Nama Mahasiswa : Nurul Asfirah  
Nomor Stambuk : 10564 0164012  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

**Pembimbing I**



**Dr. Hj. Fatmawati, M.Si**

**Pembimbing II**



**Drs. Muhammad Tahir, M.Si**

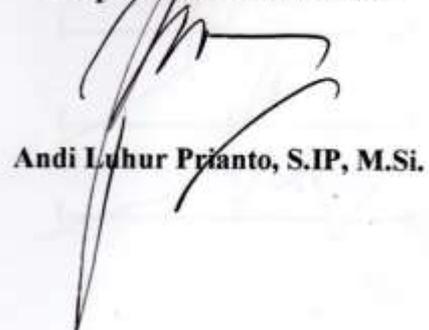
Mengetahui :

**Dekan  
Fisipol-Unismuh Makassar**



**Ir H. Saleh Molla MM**

**Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan  
Fisipol Unismuh Makassar**



**Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si.**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1184 / FSP / A. 1-VIII / VIII / 38 / 2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2017.

## TIM PENILAI

Ketua,

**Ir H. Saleh Molla MM**

Sekretaris,

**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

Penguji:

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (Ketua)

2. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

4. Dra. Hj. St Nurmaeta, MM

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Asfirah

Nomor Stambuk : 105640164012

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Agustus 2017

Yang Menyatakan,



Nurul Asfirah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)”. Skripsi merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, dan akhirnya dapat dirampungkan sekalipun dalam bentuk sederhana. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Drs. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing II yang tak kenal lelah membimbing dan mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak DR. H. Muhammad Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak A. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.

5. Seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, mulai dari pegawai tata usaha hingga para dosen yang telah mengajar dan membimbing saya.
6. Kedua orang tua saya tercinta Suratmi dan Rukmawati serta om dan tante saya Muh. Nadir Tojeng dan St.Hapipah yang selalu memberikan semangat serta mengorbankan jiwa dan raganya dan tidak pernah lelah membesarkan saya serta menjadi motivator dalam hidup saya sehingga saya bisa menyelesaikan studi S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Saudara saya Nurul Fitrah, Khaerunnisa, Nurul Muflihah, Nur alfhi Lail yang juga menjadi motivator saya untuk bisa menyelesaikan studi S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar. *You all is the best.*
8. Seluruh pihak Dinas PU bidang kebersihan Kabupaten Gowa, pihak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan masyarakat Kecamatan Somba Opu yang telah bekerja sama dalam penelitian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, Agustus 2017

Penulis

Nurul Asfirah

## ABSTRAK

**NURUL ASFIRAH.** *Tata Kelola Persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.* (dibimbing oleh Fatmawati dan Muhammad Tahir ).

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Dilihat dari sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu ini belum maksimal. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk menggambarkan tata kelola persampahan yang ada di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan mengetahui pula faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa melalui 5 indikator pengelolaan sampah yaitu penampungan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini adalah Camat/sekertaris camat, petugas kebersihan, staf bidang kebersihan, dan masyarakat dalam hal ini berjumlah 8 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola persampahan di Kecamatan Somba Opu belum maksimal. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu adanya mobil pengangkut yang berjumlah 29 unit, motor gandeng 13 unit, TPS 35 titik dan TPA yang berlokasi di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, kurangnya tenaga kerja dan masalah transportasi.

*Kata Kunci : Tata kelola*

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Tata Kelola.....	8
B. Tata Kelola Persampahan.....	13
C. Sistem Pengelolaan Sampah .....	16
D. Kerangka Pikir .....	25
E. Fokus Penelitian .....	27
F. Deskripsi Fokus.....	27
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30

B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	36
B. Profil Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gowa.....	39
C. Tata Kelola Persampahan di Kecamatan Somba Opu.....	59
D. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Tata Kelola Persampahan Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Struktur Organisasi Dinas PU Kabupaten Gowa.....	27
Tabel 2	Susunan kepegawaian dan perlengkapan .....	47
Tabel 3	Gambaran SDM Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 4	Gambaran SDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa berdasarkan Tingkat Golongan dan Kepangkatan.....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk mengatasi masalah penumpukan sampah yang selama ini menjadi penanganan jangka pendek dari permasalahan yang kompleks tentang lingkungan hidup, diperlukan campur tangan atau peran pemerintah. Menurut Ehworm (2008), tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang atau di buang dengan benar. Secara normatif, pengelolaan sampah telah diundang-undangkan dalam UU. NO. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dimaksud disini adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam undang-undang ini juga disebutkan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Kebijakan nasional dan provinsi dalam pengelolaan sampah selanjutnya dapat dirumuskan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengurangan dan penanganan sampah dari sumber timbulan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, pada aspek pengelolaan sampah sendiri, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan sampah.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah seperti yang disebutkan diatas, dapat dilakukan dari seluruh skala (skala kota dan skala lingkungan). Menurut SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik pengelolaan sampah perkotaan, pelayanan pemerintah pada pengelolaan sampah terkait pada alur penanganan sampah yaitu

pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan. Pada masing-masing tahap penanganan sampah pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan dan fasilitas hingga sampah tersebut sampai ke TPA dan atau diolah sebagai bentuk pengurangan dan pemanfaatan sampah, mengumpulkan sampah rumah tangga di tiap rumah untuk dipindahkan ke TPS.

Sampah pada dasarnya dihasilkan oleh atau merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa hakikatnya proses perubahan materi atau proses produksi apapun tidak ada yang berjalan efisien 100 persen. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah yang jumlah dan volumenya sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari gaya hidup dan jenis material yang kita konsumsi.

Lingkungan yang sehat merupakan hal yang mutlak diperlukan bagimasyarakat, dan salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan adalah adanya tumpukan sampah sebagai akibat dari tingginya aktivitas dan padatnya penduduk kota. Perkembangan kota yang pesat menyebabkan semakinbertambahnya jumlah penduduk di kota tersebut sehingga akan menambahproduksi dan volume sampah yang ada dan berbanding lurus denganperkembangan dan penambahan jumlah penduduk.

Demikian juga halnya dengan Kecamatan Somba Opu KabupatenGowa yang tidak terlepas dari permasalahan sampah. Berdasarkan data BadanPusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa tahun 2011 jumlah pendudukKecamatan Somba Opu adalah

130.126 jiwa, dengan luas wilayahnya adalah 28,09 Km<sup>2</sup>. Pola pengangkutan sampah perkotaan yang dilakukan pada saat ini adalah pola pengangkutan dengan sistem pengambilan tiap titik jalan perkotaan dari tempat sumber sampah dan TPS ke lokasi TPA, yang memakan waktu yang cukup lama. Setelah dikumpulkan, sampah diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang berlokasi di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Kecamatan Somba Opu sendiri merupakan kecamatan dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Gowa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,31% (BPS Kabupaten Gowa Tahun 2011). Dengan kepadatan dan laju pertumbuhan yang cukup tinggi membuat permasalahan persampahan yang semakin hari semakin parah di Kecamatan Somba Opu.

Dilihat dari Spesifikasi Standar Nasional Indonesia Nomor 19-2454-2002 tentang pengelolaan sampah yaitu ada lima indikator Penampungan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan. Tetapi di Kecamatan Somba Opu tidak ada penampungan yang disediakan oleh pemerintah. Penampungan yaitu sampah di tampung sementara sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang. Pengumpulan yaitu proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan yang disimpan sementara di rumah, kantor atau restoran dan sebagainya di kumpulkan untuk di angkut dan dibuang. Pemindahan yaitu memindahkan sampah yang telah dikumpulkan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke TPA. Pengangkutan yaitu sampah yang telah diangkut dikumpulkan di TPS atau dari tempat sumber-sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Pembuangan yaitu tempat yang disediakan untuk membuang sampah dan semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut.

Hal ini jelas terlihat pada beberapa kelurahan dengan jumlah produksi sampahnya yang tiap hari semakin meningkat. Pada beberapa TPS terlihat penumpukan sampah yang melebihi kapasitas kontainer sebagai wadah tempat pembuangan sampah sementara. Contohnya di Kelurahan Sunnguminas dan Kelurahan Batangkaluku. Pada beberapa kelurahan seperti di Kelurahan Mawang dan Bontoramba tidak terdapat TPS dan menyebabkan pembuangan sampah tidak terakomodir dengan baik, terdapat beberapa lokasi yang bukan peruntukan tempat sampah dan jalan yang dijadikan tempat sampah oleh masyarakat setempat. Selain itu terkait dengan alat pengangkutan yang masih kurang memadai sebagai salah satu faktor tidak terlayani pengangkutan sampah di beberapa kelurahan tersebut. Pendatang seperti pedagang yang masuk ke Kecamatan Somba Opu dan menambah debit timbulan sampah kemudian tidak diiringi dengan bertambahnya fasilitas tempat penampungan sementara atau yang biasa disebut kontainer, serta sistem pengangkutan yang tidak tepat waktu. Akibatnya lahan kosong, tanpa ada wadah khusus sehingga dapat menyebarkan bau busuk, serta bakteri penyakit yang tentu saja dapat membahayakan kesehatan masyarakat disekitarnya serta faktor lain yang menyebabkan berkurangnya nilai estetika lingkungan berupa keindahan dan kebersihan lingkungan. Selain kondisi sistem persampahan permasalahan lain pun terjadi pada sistem pengangkutan yang dilakukan petugas kebersihan masih perlu dikaji kembali, dimana masih terjadinya keterlambatan ataupun kurangnya pelayanan dalam waktu pengangkutan sampah sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat yang disebabkan terlalu banyaknya sampah yang bertumpuk,

belum lagi ditambah dengan bau sampah itu sendiri, hal ini apabila terus dilakukan, maka semakin lama akan terjadi pencemaran lingkungan. Dengan melihat kondisi persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa maka sebaiknya didalam tata kelola persampahan pemerintah menerapkan beberapa prinsip good governance di antaranya yaitu menurut UNDP (dalam Mardiasmo, 2002) Partisipasi (Participation), Akuntabilitas (Accountability), dan Responsif (Responsiveness).

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 4 mengemukakan bahwa Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sehingga dibutuhkan penanganan serius dan solusi cerdas dalam masalah sampah ini, karena akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Bertitik tolak dari uraian tersebut maka diperlukan perhatian serius semua pihak terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul suatu permasalahan bahwa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sangat rentan terhadap pencemaran sampah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu "Tata Kelola Persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa".

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Kelola Persampahan di Kecamatan Somba Opu.

2. Apakah Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata kelola persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah pengelolaan sampah di Kecamatan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara Pemerintah dan masyarakat bersinergi

mendukung serta melihat apa saja yang menjadi hambatan pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Tata Kelola**

Istilah tata kelola memiliki beragam definisi tergantung pada berbagai keadaan lingkungan, struktural, dan budaya, serta kerangka hukum dalam rangka pencapaian tujuan. Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama.

Berkaitan dengan tata kelola persampahan yang terjadi di Indonesia, maka sangatlah dibutuhkan dan mendesak untuk mengimplementasikan konsep Good Governance ini. Good Governance dimaknai secara sederhana sebagai bentuk terbaik dari proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mengadakan *publik goods and services*. Penerapan *Good Governance* ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat terutama terkait dengan koordinasi, profesionalitas, etos kerja, moralitas dan integritas.

Menurut Ghani (dalam Widodo, 2001) yang dimaksud dengan *Good Governance* adalah Mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor publik atau pemerintah dan sektor swasta/privat serta masyarakat dalam suatu kegiatan kolektif. Pemerintah sebagai komponen pembuat sekaligus pelaksana kebijakan sudah saatnya untuk bertindak secara transparan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan tugasnya. Untuk itu pemerintah hendaknya tidak membuat dan menjalankan suatu kebijaksanaan secara otokratis

berdasarkan kemauannya sendiri. Akan tetapi pemerintah harus selalu melibatkan unsure-unsur lain dalam masyarakat, baik sektor swasta maupun komponen *civil society* yang sering disebut sebagai *Good Governance*. Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan respon terhadap dinamika masyarakat yang menghendaki adanya sebuah kondisi yang transparan dan akuntabel. *Good Governance* juga diartikan sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

World Bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi politik maupun administrasi. Artinya *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, efisien, dan efektif dengan unsur-unsur profesionalisme, akuntabilisme, dan transparansi. Akhirnya *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik (Tjokroamidjojo, 1999). Dengan demikian *Good Governace* secara sederhana dapat dimaknai sebagai bentuk terbaik dari proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mengadakan *public goods and service*.

Konsep Governance sebenarnya merupakan suatu konsep tentang bagaimana sebaiknya kebijakan publik itu dibuat melalui pelibatan aktif: pemerintah sendiri, sektor swasta (pengusaha), *civil society* (LSM, kelompok profesional dan sebagainya).

*Good Governance* merupakan suatu jaringan para pelaku yang memerintah secara mandiri dan otonom. Jaringan governance tidak hanya melibatkan upaya mempengaruhi pemerintah, tetapi juga mengambil alih urusan pemerintah. Dalam konteks pengertian governance demikian, suatu pemerintahan yang baik pada intinya harus memenuhi prinsip-prinsip: demokratis, produktif, efisien, melayani public, transparan, akuntabel, responsive, adil, partisipatif yang diharapkan menciptakan pemerintahan yang memiliki legitimasi dan kompetensi.

**a. Karakteristik *Good Governance***

Adapun karakteristik *Good Governance* menurut UNDP (dalam Mardiasmo, 2002) adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Peraturan Hukum (*Rule Of Law*)

Peraturan hukum adalah kerangka aturan hukum yang adil dan dilaksanakan dengan tidak pandang bulu.

c. Keterbukaan (*Transparansi*)

Keterbukaan adalah keterbukaan memperoleh informasi terutama berkaitan dengan kepentingan publik agar dapat diakses secara langsung bagi mereka yang membutuhkan.

d. Responsif (*Responsiveness*)

Responsif yaitu ketanggapan lembaga-lembaga publik untuk melayani stakeholders

e. Berorientasi pada consensus (*Concensus Orientation*)

Berorientasi pada consensus yaitu menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik demi kepentingan yang lebih luas.

f. Persamaan (*Equality*)

Persamaan yaitu adanya kesempatan yang sama bagi semua warga Negara tanpa pembedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri

g. Efektifitas dan Efisiensi

Efektifitas dan efisiensi adalah penyelenggaraan Negara harus menghasilkan sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya secara semaksimal mungkin.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah semua kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dilakukan oleh unsur governance (pemerintah, swasta dan masyarakat) harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.

i. Visi yang Strategis (*Strategic Vision*)

Visi yang strategis yaitu pemimpin dan public harus memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan kebutuhan pembangunan (Mardiasmo 2002).

Kesembilan karakteristik *Good Governace* di atas pada prinsipnya akan membawa proses-proses kenegaraan pada suatu kondisi dimana terjadi sinergitas

antara ketiga domain *good governance* tadi. Akan tetapi peran dominan tetap berada pada kekuasaan state (Negara), sehingga mau tidak mau para pejabat Negara harus mampu menjadi motor penggerak *good governance* diatas, maka *good governance* tidak dapat dilepaskan dari akuntabilitas. Untuk menciptakan kondisi yang efektif, efisien, kenegaraan, akuntabilitas para penyelenggara Negara mutlak diperlukan. Tanpa akuntabilitas, maka semua harapan dan keinginan *good governance* tidak mungkin akan tercapai.

Dengan melihat kesembilan karakteristik *Good Governance* menurut UNDP (dalam Mardiasmo, 2002) maka sebaiknya dalam tata kelola persampahan diterapkan beberapa karakteristik *Good Governance*, diantaranya yaitu:

a. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah semua kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dilakukan oleh unsur governance (pemerintah, swasta dan masyarakat) harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.

c. Responsif (*Responsiveness*)

Responsif yaitu ketanggapan lembaga-lembaga publik untuk melayani stakeholders.

\

## **B. Tata Kelola Persampahan**

### **1. Pengertian Sampah**

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelilingkungan.

### **2. Jenis-Jenis Sampah**

Jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan sampah peternakan, sampah industri/kantor/sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagaiberikut :

#### **a. Sampah Organik**

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.

## b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/ mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng, (Gelbert;1996).

## 3. Sumber-Sumber Sampah

### a. Sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*)

Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun, dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau taman.

### b. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum

Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas, plastik, botol, daun, dan sebagainya.

c. Sampah yang berasal dari perkantoran

Sampah ini dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat anorganik, dan mudah terbakar (*rubbish*).

d. Sampah yang berasal dari jalan raya

Sampah ini berasal dari pembersihan jalan, yang umumnya terdiri dari : kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil-onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik, dan sebagainya.

e. Sampah yang berasal dari industri (*industrial wastes*)

Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi, misalnya : sampah-sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, potongan tekstil, kaleng, dan sebagainya.

f. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan

Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.

g. Sampah yang berasal dari pertambangan

Sampah ini berasal dari daerah pertambangan, dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, misalnya: batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.

h. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan

Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini, berupa : kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan bangkai binatang, dan sebagainya.

### **C. Sistem Pengelolaan Sampah**

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi lima aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Departemen Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat.

#### **1. Aspek Teknik Operasional**

Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek persampahan. Menurut Hartoyo (1998:6), perencanaan sistem persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/ pengolahan.

### **a. Penampungan sampah/pewadahan**

Proses awal dalam penampungan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah untuk menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan.

Bahan wadah yang dipersyaratkan sesuai Standard Nasional Indonesia adalah tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan. Sedangkan menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), persyaratan bahan wadah adalah awet dan tahan air, mudah diperbaiki, ringan dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat. Macam tempat sampah yang dipakai untuk penyimpanan sampah ini banyak ragamnya. Di negara yang telah maju dipergunakan kertas plastik ataupun kertas tebal. Sedangkan di Indonesia yang lazim ditemui adalah keranjang plastik, rotan dan lain sebagainya (Aswar, 1990).

Menurut SNI 19- 2454-2002 pola pewadahan sampah dibagi menjadi:

- 1) Sampah organik seperti daun sisa, sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan dengan adawarna gelap.
- 2) Sampah anorganik seperti gelas, plastik, logam dan lainnya, dengan wadah warna terang.
- 3) Sampah bahan berbahaya beracun rumah tangga (jenis sampah B3), dengan warna merah yang diberi lambang khusus atau semua ketentuan yang berlaku.

Adapun syarat-syarat tempat sampah yang dianjurkan adalah:

- 1) Konstruksinya kuat, jadi tidak mudah bocor, penting untuk mencegah berseraknya sampah.
- 2) Tempat sampah mempunyai tutup, tetapi tutup ini dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibuka, dikosongkan isinya serta dibersihkan. Amat dianjurkan agar tutup sampah ini dapat dibuka atau ditutup tanpa mengotori tangan.
- 3) Ukuran tempat sampah sedemikian rupa sehingga mudah diangkat oleh satu orang.

Macam tempat sampah yang dipakai untuk penyimpanan sampah ini banyak ragamnya. Di negara yang telah maju dipergunakan kertas plastik, atau kertas tebal. Sedangkan di Indonesia yang lazim ditemui adalah keranjang, plastik, rotan, dan lain sebagainya (Aswar, 1990).

#### **b. Pengumpulan sampah**

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan/pewadahan ke gerobak/becak sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Sampah yang disimpan sementara di rumah, kantor atau restoran, tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk kemudian diangkut, dibuang ataupun dimusnahkan.

#### **c. Pemandahan Sampah**

Proses pemandahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemandahan sampah adalah

depopemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut atauramdan atau kantor, bengkel. Pemindahan sampah yang telahterpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tersebut bercampurkembali (Widyatmoko dan SintoriniMoerdjoko, 2002:29).

#### **d. Pengangkutan Sampah**

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat (Widyatmoko dan SintoriniMoerdjoko, 2002:29). Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan perkotaan dan permukiman.

#### **e. Pembuangan Akhir Sampah**

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 metode yaitu :

### 1) Metode *Open Dumping*

Merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/ menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus/ pengolahan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

### 2) Metode *Controlled Landfill* (Penimbunan terkendali)

Controlled Landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

### 3) Metode *Sanitary landfill* (Lahan Urug Saniter)

Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

## **2. Aspek Kelembagaan**

Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola (Widyatmoko dan SintoriniMoerdjoko, 2002:29). Jumlah personil pengelola persampahan harus cukup memadai sesuai dengan lingkup

tugasnya. Untuk sistem pengumpulan jumlah personil minimal 1 orang per 1.000 penduduk yang dilayani sedangkan sistem pengangkutan, sistem pembuangan akhir dan staf minimal 1 orang per 1.000 penduduk (SNI 19-2454-2002).

### **3. Aspek Pembiayaan**

Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Selama ini dalam pengelolaan sampah perkotaan memerlukan subsidi yang cukup besar, kemudian diharapkan sistem pengelolaan sampah ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi.

### **4. Aspek Peraturan/Hukum**

Prinsip aspek peraturan pengelolaan persampahan berupa peraturan-peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan yang meliputi (Hartoyo, n1998:8) :

- a. Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan.
- b. Perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan.
- c. Perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.

## **5. Aspek Peran Masyarakat**

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat lebih mempercayai proyek/program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan.

Bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan atau pembuangan sampah antara lain: pengetahuan tentang sampah/kebersihan, rutinitas pembayaran retribusi sampah, adanya iuran sampah RT/RW/Kelurahan, kegiatan kerja bakti, penyediaan tempat sampah.

## **6. Hubungan Sampah Terhadap Masyarakat dan Lingkungan**

Menurut Chandra, Budiman (2006) pengelolaan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri. Pengaruhnya tentu saja ada yang positif dan juga ada yang negatif. Pengaruh positif dari pengelolaan sampah ini terhadap masyarakat dan lingkungan, antara lain :

- a. Sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan dataran rendah.
- b. Sampah dapat dimanfaatkan untuk pupuk.

- c. Sampah dapat diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses pengelolaan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk sampah terhadap ternak .
- d. Pengelolaan sampah menyebabkan berkurangnya tempat untuk berkembang biak serangga atau binatang pengerat.
- e. Menurunkan insidensi kasus penyakit menular yang erat hubungannya dengan sampah.
- f. Keadaan estetika lingkungan yang bersih menimbulkan kegairahan hidup masyarakat.
- g. Keadaan lingkungan yang baik mencerminkan kemajuan budaya masyarakat.
- h. Keadaan lingkungan yang baik akan menghemat pengeluaran dana kesehatan suatu Negara sehingga dana itu dapat digunakan untuk keperluan lain.

Sedangkan pengaruh negatif dari sampah terhadap kesehatan, lingkungan maupun sosial ekonomi dan budaya masyarakat, antara lain :

- a. Pengaruh terhadap kesehatan - Pengolahan sampah yang kurang baik akan menjadikan sampah sebagai tempat perkembangbiakan sektor penyakit seperti lalat atau tikus.
  - 1) Insidensi penyakit Demam Berdarah dengue akan meningkat karena vector penyakit hidup dan berkembang biak dalam sampah kaleng maupun ban bekas yang berisi air hujan.

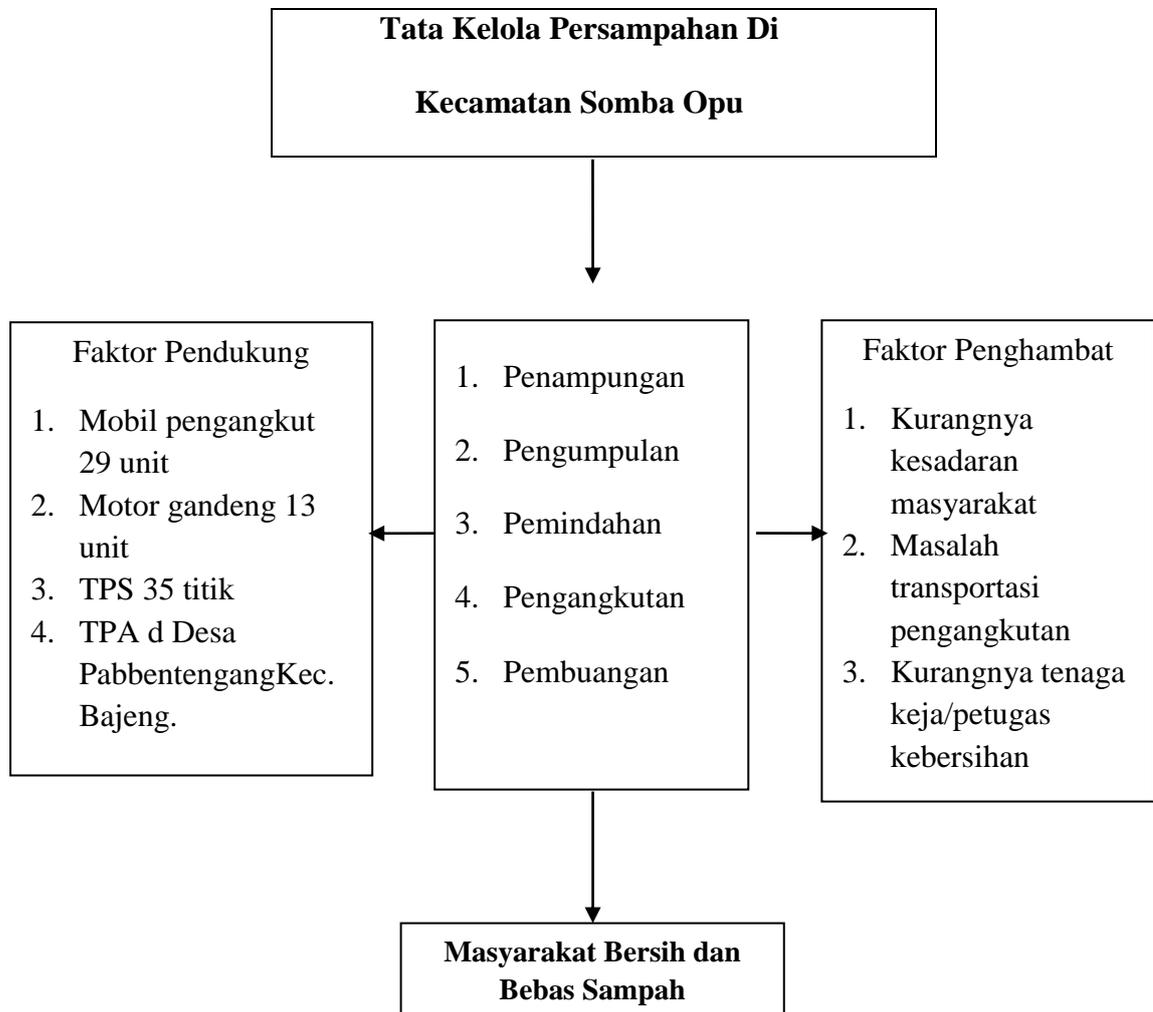
- 2) Terjadinya kecelakaan akibat pembuangan sampah secara sembarangan misalnya luka akibat benda tajam seperti besi, kaca dan sebagainya.
  - 3) Gangguan psikosomatis, misalnya sesak nafas, insomnia, stress dan lain-lain.
- b. Pengaruh terhadap lingkungan - Estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata .
- 1) Proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk.
  - 2) Pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahaya kebakaran yang lebih luas.
  - 3) Pembuangan sampah ke dalam saluran pembuangan air akan menyebabkan aliran air terganggu dan saluran air akan menjadi dangkal.
  - 4) Apabila musim hujan datang, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir dan mengakibatkan pencemaran pada sumber air permukaan atau sumur dangkal.
  - 5) Air banjir dapat mengakibatkan kerusakan pada fasilitas masyarakat seperti jalan, jembatan dan saluran air.
- c. Pengaruh terhadap sosial ekonomi dan budaya masyarakat - Pengelolaan sampah yang kurang baik mencerminkan keadaan sosial budaya masyarakat setempat.
- 1) Keadaan lingkungan yang kurang baik dan jorok, akan menurunkan minat dan hasrat orang lain (turis) untuk datang berkunjung ke daerah tersebut.

- 2) Dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara penduduk setempat dan pihak pengelola (misalnya kasus TPA BantarGebang, Bekasi).
- 3) Angka kasus kesakitan meningkat dan mengurangi hari kerja dan produktifitas masyarakat menurun.
- 4) Kegiatan perbaikan lingkungan yang rusak memerlukan dana yang besar sehingga dana untuk sektor lain berkurang.
- 5) Penurunan pemasukan daerah (devisa) akibat penurunan jumlah wisatawan yang diikuti dengan penurunan penghasilan masyarakat setempat.
- 6) Penurunan mutu dan sumber daya alam sehingga mutu produksi menurun dan tidak memiliki nilai ekonomis.
- 7) Penumpukan sampah di pinggir jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang dapat menghambat kegiatan transportasi barang dan jasa.

#### **D. Kerangka Pikir**

Tata cara pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantaidengan urutan yang berkesinambungan, yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.

## Bagan Kerangka Pikir



### **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir dalam penelitian ini, pelaksanaan pengangkutan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Adapun yang memuat dalam kerangka pikir dalam penelitian yaitu:

1. Tata kelola persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

### **F. Deskripsi Fokus Penelitian**

Guna memudahkan proses analisa data yang diperoleh, yang akan memperjelas pembahasan utama dari suatu hasil penelitian maka ditentukanlah fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tata kelola persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Maka penelitian ini di fokuskan pada beberapa hal meliputi :

1. Penampungan sampah/pewadahan

Proses awal dalam penampungan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah untuk menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. (SNI 19-2454-2002).

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan/pewadahan ke gerobak/becak sampah sampai

tempat pembuangan sementara. Sampah yang disimpan sementara di rumah, kantor atau restoran, tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk kemudian diangkut, dibuang ataupun dimusnahkan.

### 1. Pemindahan Sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut atau ramdan atau kantor, bengkel. Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali (Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002:29).

### 2. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truk container tertentu yang dilengkapi pengepres. (SNI 19-2454-2002).

### 3. Pembuangan Akhir Sampah

Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Tempat menyingkirkan sampah kota sehingga aman. Pembuangan akhir merupakan tempat yang

disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir adalah memusnahkan sampah domestik disuatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan yaitu Oktober sampai Desember di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Alasan memilih di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian karena kurang maksimalnya Pengelolaan sampah.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan makna data-data empirik yang berkaitan dengan hal agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang tata kelola persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah Fenomenologi dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai tata kelola persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

#### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini setidaknya ada 2 sumber data yang dipergunakan, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan, yaitu kepada orang-orang yang mengetahui lebih mendalam tentang topik penelitian secara akurat dan mampu mewakili kelompok dalam membahas kegiatan tata kelola persampahan.
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasikan dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan kepustakaan yang berhubungan dengan tata kelola persampahan.

#### **D. Informan Penelitian**

Adapun informan dari penelitian ini terdiri dari 18 orang yaitu : Camat, Petugas Kebersihan, Masyarakat, dan staf di Kantor Camat Somba Opu. Masyarakat yang dimaksud disini yaitu masing-masing diambil dari setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

<b>No</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Inisial</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Muh. Alpis .Ar	M.A	Seksi Bidang Kebersihan	1
2.	RuslanEfendi	R.E	Seksi Bidang Kebersihan	1
3.	Ibu Nurmi	I.N	Masyarakat	1
4.	Dg.Puji	D.P	Masyarakat	1
5.	St. Halimah	S.H	Masyarakat	1
6.	Dg. Malayu	D.M	petugas Kebersihan	1

7.	Dg. Ona	D.O	etugas Kebersihan	1
8.	Hj. EmyPratiwiLuthfy , S.IP.,M.Si	E.P	Sekertaris Camat	1
<b>Total Informan</b>				<b>8</b>

### E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi adalah penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang secara sistematis terhadap obyek penelitian di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

#### 2. Wawancara

Wawancara penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung (Tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Tehnik wawancara yang digunakan adalah tehnik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antara informan satu dengan yang lain.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek

penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang tata kelola persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memuat dua aspek yaitu: a) analisis sebelum dilapangan dengan melakukan analisis data hasil studi pendahuluan yang digunakan dalam penentuan fokus penelitian yang berkaitan pengelolaan air limbah domestik. b) analisis selama di lapangan dengan menggunakan Model Miles and Huberman (Sugiono, 2012:246) bahwa terdapat beberapa komponen analisis dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan carainteraktif terhadap komponen tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yaitu peneliti melakukan pengumpulan data hasil studi pendahuluan sebelum ke lapangan dan menganalisis data tersebut untuk keperluan penentuan fokus penelitian dan pengumpulan data setelah di lapangan. Banyaknya data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data.

##### **2. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang

dianggap relevan melalui reduksi data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang dianggap penting.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu data yang telah disajikan dijadikan dasar untuk melahirkan kesimpulan awal. Kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan akan berubah jika pengumpulan data selanjutnya ditemukan informasi baru dan terverifikasi maka kesimpulan sebelumnya dilakukan penyempurnaan.

## G. Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik triangulasi.

### 1. TrianggulasSumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan mengacu William Wiersma, (1986) dalam Sugiono, (2012:273) data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber tersebut.

### 2. Trianggulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

### 3. Trianggulasi Waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa**

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa

dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km<sup>2</sup> dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km<sup>2</sup> yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m<sup>3</sup> dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti

itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember.

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2009 sebesar 695.697 jiwa, laki-laki berjumlah 344.740 jiwa dan perempuan sebanyak 350.957 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 99,18% adalah pemeluk Agama Islam.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

## **2. Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu**

Kecamatan Somba Opu juga merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya untuk wilayah perkotaan, yakni sebanyak 130.126 orang dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 64.442 orang dan perempuan sebesar 65.684. Penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih bertumpu di Kecamatan Somba Opu yakni sebesar 19,95 persen dari total jumlah penduduk kabupaten Gowa sebesar 652.329 orang. Kecamatan Somba Opu tercatat sebagai kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yakni sebanyak 4.632 orang/km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Somba Opu adalah yang tertinggi dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Gowa yakni sebesar 4,07 persen. Kecamatan Somba Opu memiliki rata-rata anggota rumah tangga terbesar sebanyak 4,65 orang dari total jumlah rumah tangga yakni 28.002 KK.

## **B. Profil Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gowa**

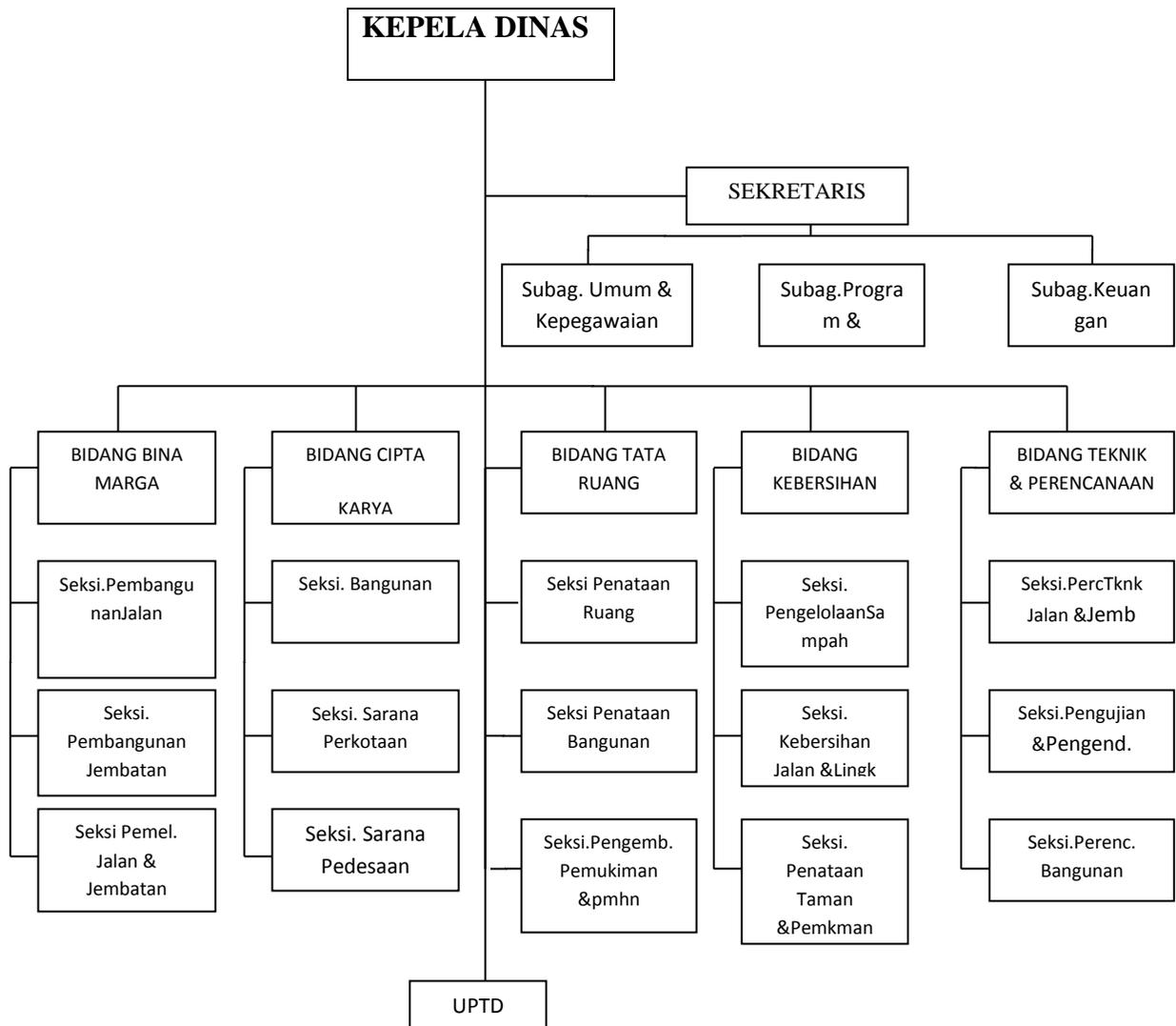
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa. Terdapat beberapa bidang didalam dinas Pekerjaan Umum yaitu bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang tata ruang, bidang kebersihan, dan bidang teknik dan perencanaan.

### **1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum**

Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Dengan kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku dibidang kelembagaan pemerintah daerah.

Adapun struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa Dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Tabel 1 Struktur Organisasi Dinas PU Kabupaten Gowa



Sumber : Kantor dinas PU Kabupaten Gowa Oktober 2016

## 2. Tugas Tiap Bidang

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa. dibawah ini

penjelasan mengenai rincian tugas tiap bagian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa yaitu ;

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dinas;
- b. Penyusunan rencana strategik dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana strategik dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi misi daerah;

- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya;
- c. Menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas, menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan, pengawasan dan pengendalian bangunan kebinamargaan dan keciptakaryaan;
- d. Menetapkan kebijakan bangunan kebinamargaan dan keciptakaryaan;
- e. Menyelenggarakan perizinan atas pemanfaatan/penggunaan ruang sesuai peruntukannya, menyelenggarakan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan menengah kabupaten dengan mengacu kepada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi, menyelenggarakan pembiayaan pembangunan bangunan kebinamargaan dan keciptakaryaan;
- f. Membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah;
- g. Membina pelaksanaan program waskat di lingkungan dinas, membina pelaksanaan tugas-tugas unit pelaksana teknis dinas;
- h. Mengarahkan pelaksanaan program kerja dinas;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- j. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan dinas;

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2. Sekertariat

Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum;

- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;
- f. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
- g. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
- j. Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan kegiatan umum perkantoran;
- k. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Bina Marga. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Bina Marga;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - b. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Menyusun rencana pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
  - d. Melaksanakan verifikasi rencana desain pembangunan jalan dan jembatan;
  - e. Melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan penyajian data dan informasi terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - f. Melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran serta penyimpanan data terhadap pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - g. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
  - h. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran lingkup Bidang Bina Marga;
  - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Cipta Karya

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Cipta Karya. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Cipta Karya;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Cipta Karya;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Cipta Karya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Melaksanakan rencana pengembangan dan pengawasan;
- d. Melaksanakan survei terhadap penataan bangunan dan lingkungan serta sarana perkotaan dan pedesaan;
- e. Melaksanakan pendataan dan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan umum dalam hal pengembangan dan pengawasan, penataan bangunan dan lingkungan serta sarana perkotaan dan pedesaan;

- f. Melaksanakan pendataan terhadap program penyediaan sarana perkotaan dan pedesaan dan melaksanakan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. Menyusun estimasi anggaran pemeliharaan rutin dan rencana tahunan;
  - h. Merumuskan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - i. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran;
  - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - k. Mengecek pelaksanaan tugas bawahannya;
  - l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Tata Ruang. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Penataan Ruang;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Penataan Ruang.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Merumuskan kebijaksanaan teknis rencana terperinci mengenai peruntukan tanah sesuai dengan rencana induk kota, merumuskan kebijaksanaan teknis rencana peletakan (*site plan*) dan rencana khusus pusat kota, daerah pertokoan, daerah perdagangan, pusat lingkungan, daerah industri dan bangunan-bangunan lainnya yang dapat mempengaruhi ketertiban dan keindahan kota;
- d. Merumuskan kebijaksanaan teknis rencana kapling dari tiap penggunaan tanah dan garis besar bentuk bangunan termasuk rencana jalan, riol, saluran air terbuka, saluran air hujan, jalur hijau dan garis bangunan;
- e. Menyusun rencana dan program dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dan analisa data serta melaksanakan studi dalam hubungannya dengan perencanaan dan pengembangan kota;
- f. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
- g. Menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan;
- h. Melaksanakan pemantauan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap pembangunan sarana dan prasarana umum, fungsi kawasan,

pemanfaatan/penggunaan lahan, melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran;

- i. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 6. Bidang Kebersihan

Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Kebersihan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Kebersihan;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja tahunan dalam bidang pengelolaan kebersihan, taman dan pemakaman;
- c. Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kebersihan jalan dan lingkungan;
- d. Penyelenggaraan pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman dan pemakaman;
- e. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kebersihan;
- f. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Kebersihan;

- g. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Kebersihan.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Melaksanakan pemantauan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap Bidang Kebersihan;
- d. Menyelenggarakan teknis pelaksanaan penyapuan jalan pengangkutan sampah langganan, sampah umum dan sampah galian serta limbah lingkungan;
- e. Menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis rencana dan program pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- f. Menyelenggarakan penyuluhan dan penguatan institusi;
- g. Menyelenggarakan penataan, pemeliharaan taman dan pemakaman;
- h. Menyusun LAKIP;
- i. Mengelola administrasi urusan tertentu;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 7. Bidang Teknik dan Perencanaan

Kepala Bidang Teknik dan Perencanaan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,

menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Teknik dan Perencanaan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Teknik dan Perencanaan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Teknik dan Perencanaan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Teknik dan Perencanaan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Teknik dan Perencanaan.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Menganalisa dan menyajikan data kebutuhan jasa konstruksi;
- d. Menyusun data penilaian kinerja pegawai struktural lingkup Bidang Teknik dan Perencanaan;
- e. Mengoperasionalkan peralatan laboratorium dan peralatan jasa konstruksi;
- f. Menyusun spesifikasi standar uji mutu dan prosedur sehubungan dengan tugas Bidang Teknik dan Perencanaan;
- g. Merumuskan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;
- h. Memantau dan mengendalikan kegiatan staf;

- i. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas PU Per 31 Desember 2010 untuk melaksanakan Tupoksinya sebanyak 137 orang terdiri atas 130 PNS dan 7 Non PNS. Gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Susunan kepegawaian dan perlengkapan.

No	Keterangan	Jumlah	
1	Struktural	25	Orang
2	Fungsional	1	Orang
3	Staf	104	Orang
4	Non PNS	7	Orang
Jumlah		137	Orang

Sumber : Kantor Dinas PU Kabupaten Gowa Oktober 2016

Gambaran SDM Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Gambaran SDM Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
	D	1	Orang
	IP	2	Orang
	IA/SMEA	34	Orang
	M	20	Orang
	RMUD	4	Orang
		57	Orang
		12	Orang
	Jumlah Pegawai	130	

Sumber : Kantor Dinas PU Kabupaten Gowa Oktober 2016

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa secara umum aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa memiliki potensi yang cukup memadai dibidang Pekerjaan Umum, Hal ini terutama ditunjukkan dari tingkat pendidikan formal dimana 9,23 % berpendidikan S2, 43,85 % berpendidikan S1, 3,08 % berpendidikan Sarjana Muda, 26,16 % Berpendidikan SMEA/SMA 15,39 % berpendidikan STM, 1,54 % berpendidikan SMP dan 0,77 % berpendidikan Sekolah Dasar.

Gambaran SDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa berdasarkan Tingkat Golongan dan Kepangkatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Gambaran SDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa berdasarkan Tingkat Golongan dan Kepangkatan.

No	Golongan/Kepangkatan	Jumlah	
1	IV	5	Orang
2	III	83	Orang
3	II	40	Orang
4	I	2	Orang
5	Non PNS	7	Orang

Sumber : Kantor Dinas PU Kabupaten Gowa Oktober 2016

Dari grafik diatas terlihat dimana aparat didominasi oleh golongan III sebanyak 63,85%, sementara golongan IV sebanyak 3,85%. Sebagai aparat golongan II sebanyak 30,77 % yang melaksanakan tugas-tugas operasional dan dibantu oleh tenaga honorer dan golongan I sebanyak 1,54 %.

Kondisi umum sumber daya manusia aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa cukup potensial untuk mengemban tugas dan fungsi organisasi. Hanya saja untuk mengantisipasi perubahan sistim perencanaan pembangunan daerah dengan segala implikasinya masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas tersebut terutama melalui Diklat Teknis dan Fungsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

#### **4. Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa**

##### **a. Visi Dinas Pekerjaan Umum**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa dijabarkan yaitu “Tersedianya Infrastruktur PU Yang Handal Dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Terwujudnya Gowa Yang Handal Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat “

Visi yang dirumuskan ini juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa kedepan .

##### **b. Misi Dinas Pekerjaan Umum**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan rumusan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa adalah :

1. Memenuhi kebutuhan Infrastruktur Wilayah di bidang jalan dan jembatan dalam mendukung pengembangan wilayah.
2. Mengembangkan Infrastruktur Permukiman untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni.

3. Mengembangkan dan melaksanakan pembinaan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.
4. Menata Ruang wilayah yang berkualitas.
5. Mengembangkan kemampuan profesionalisme SDM serta penerapan tatalaksana organisasi yang efektif dan efisien.

Misi diatas merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Misi yang dirumuskan ini menunjukkan kristalisasi tugas pokok dan fungsi setiap Bidang Dinas Pekerjaan Umum, misi pertama oleh Bidang Bina Marga, misi kedua oleh Bidang Kebersihan, misi ketiga Bidang Cipta Karya, misi keempat Bidang Tata Ruang dan misi kelima oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum.

#### c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Tujuan yang dimaksudkan didalam Renja ini adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa sebagai berikut :

1. Terselenggaranya mekanisme Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
2. Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk mendukung kelancaran transportasi darat sebagai bagian sistem transportasi untuk menunjang lalulintas ekonomi.
3. Terwujudnya sarana dan prasarana permukiman untuk menciptakan permukiman yang layak, sehat dan berwawasan lingkungan serta mendorong pengembangan wilayah/kawasan tertentu.
4. Menyiapkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah perkotaan yang berwawasan pemanfaatan ruang
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
6. Terwujudnya kesadaran dan ketaatan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan.
7. Mewujudkan & meningkatkan kualitas maupun profesionalisme SDM serta memiliki jiwa good governance.
8. Terciptanya lingkungan permukiman yang aman, nyaman dan serasi serta sarana & prasarana wilayah yang memadai, terjangkau dan mampu mengakses pemenuhan kebutuhan masyarakat.
9. Terlaksananya administrasi perencanaan teknis kegiatan pekerjaan jalan dan jembatan untuk menunjang hasil pelaksanaan pekerjaan yang baik.
10. Pengujian dan pengendalian mutu bahan/material pekerjaan kePUan dan terpeliharanya peralatan laboratorium.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga akan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai. Sesuai tujuan tersebut diatas, maka sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) perkotaan.
2. Tersusunnya dokumen/kegiatan pembangunan yang terintegratif dan partisipatif.
3. Tersedianya dokumen kawasan strategis wilayah perkotaan.
4. Tersedianya sistim pengelolaan perizinan bangunan yang efisien dan efektif sesuai standar pelayanan prima.
5. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan kebersihan.
6. Tersedianya lingkungan permukiman penduduk yang indah dan berkesinambungan.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan.
8. Tersedia dan tertatanya kawasan taman kota.
9. Terwujudnya kelancaran transportasi darat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kondisi jalan provinsi, jalan nasional dan membangun, mengganti serta memelihara jembatan.

d. Landasan Hukum

1. Peraturan daerah Kabupaten Gowa no 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata ruang kerja dinas daerah Kabupaten Gowa.
2. Peraturan daerah Kabupaten Gowa no 02 tahun 2000 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
3. Peraturan pemerintah no 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
4. UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
5. UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. UU no 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup.

#### **5. Tata Kelola Persampahan di Kecamatan Somba Opu**

Tata kelola di Kecamatan Somba Opu dilakukan secara konvensional oleh petugas kebersihan yaitu mulai dari pengumpulan lalu dipindahkan kemudian diangkut dan dibuang ke TPA yang berlokasi di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Secara mekanisme tata kelola persampahan yang baik dan benar yaitu sesuai dengan spesifikasi yang digunakan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang tata cara pengelolaan sampah di pemukiman. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan/pengolahan. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Tata kelola persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa maka peneliti

menggunakan tehnik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Penampungan

Penampungan yang dimaksud disini adalah proses awal yang dilakukan sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPS. Tujuannya adalah untuk menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan seksi bidang kebersihan yang mengatakan bahwa :

“Belum ada penampungan karena kurangnya dana, masyarakat hanya membuang sampah di TPS atau di tempat pengumpulan yang disediakan”(M.A 5 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi bidang kebersihan dapat dianalisa bahwa di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa belum ada tempat penampungan yang ada hanya TPS atau tempat pengumpulan sementara.

Dari hasil wawancara dengan salah satu seksi bidang kebersihan ini dibenarkan juga oleh seksi bidang kebersihan lainnya,ia mengatakan bahwa :

“Tidak ada tempat penampungan karena kurangnya biaya,masyarkathanya membuang sampahnya di TPS”(R.E 5oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu seksi bidang kebersihan yang lain dapat dianalisa bahwa benar di Kecamatan Somba Opu tidak ada tempat penampungan yang ada hanyalah TPS dan masyarakat hanya membuang sampahnya

di TPS maka dari itu pemerintah sebaiknya menyediakan tempat penampungan agar masyarakat bisa menampung sampahnya.

Hampir sama dengan apa yang di katakan oleh masyarakat kepada peneliti, Ia mengatakan bahwa :

“Tidak ada tempat penampungan, masyarakat terbiasa menyimpan sampah depan rumah menunggu mobil pengangkut atau membawa ke TPS atau tempat pengumpulan sementara” (I.Nkel.Sungguminasa 18 oktober 2016).

“Tidak ada tempat penampungan, masyarakat terbiasa membuang sampah disungai jeknek berang atau membakarnya apabila mobil pengangkut tidak datang karena TPS juga yang jauh” (D.P Kel.Pandang-pandang 18 oktober 2016)

“Tidak ada penampungan sehingga sampah biasanya dibakar kecuali kalau sampah basah baru dibawa ke TPS” (S.H Kel.Kalegowa 19 oktober 2016).

Dari hasil wawancara dengan ke 3 masyarakat dari kelurahan yang berbeda dapat dianalisa bahwa di Kecamatan Somba Opu tidak ada tempat penampungan yang ada hanya TPS, oleh sebab itu masyarakat hanya membuang sampah di TPS tetapi ada juga yang menyimpan depan rumah menunggu mobil pengangkut apabila mobil pengangkut tidak datang masyarakat biasa membuang sampahnya di sungai jeknekberang atau membakarnya. Sesuai dengan Spesifikasi di dalam SNI 19-2454-2002 tentang pengelolaan sampah sebaiknya ada tempat penampungan yg diberikan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu dinas PU bidang kebersihan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan atau membakarnya sendiri.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan petugas kebersihan yang hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh seksi bidang kebersihan dengan masyarakat, Ia mengatakan bahwa :

“Tidak ada tempat penampungan mungkin karena kurangnya dana pemerintah, kami sangat berharap adanya penampungan. Masyarakat juga terkadang membuang sampahnya di TPS atau didepan rumah menunggu mobil pengangkut” (D.M 19 oktober 2016).

“Tidak ada tempat penampungan tetapi masyarakat mengharapkan adanya penampungan disetiap RT/RW. Masyarakat biasanya membuang sampah di TPS atau di depan rumah” (D.O 19 oktober 2016).

Dari hasil wawancara dengan petugas kebersihan dapat di analisa bahwa di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tidak ada tempat penampungan, masyarakat hanya membuang sampah di TPS atau menyimpan di depan rumah menunggu mobil pengangkut. Di Kecamatan Somba Opu sangat dibutuhkan adanya tempat penampungan agar masyarakat dan petugas kebersihan bisa bekerja sama dalam pengelolaan sampah. Petugas kebersihan juga menginginkan adanya tempat penampungan yang diberikan oleh pemerintah.

#### b. Pengumpulan

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulaidari tempat penampungan/pewadahan ke gerobak/becak sampah sampai ketempatpembuangan sementara. Sampah yang disimpan sementara dirumah,

kantor atau restoran, tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk kemudian diangkut, dibuang ataupun dimusnahkan.

Berikut wawancara peneliti dengan salah satu seksi bidang kebersihan yang mengatakan bahwa :

“Dinas PU bidang kebersihan menyediakan pengumpulan sampah atau TPS yang letaknya ada di setiap kelurahan. Ada 3-4 TPS. setiap kelurahan” (M.A 5 oktober 2016).

Seksi bidang kebersihan yang lain juga membenarkan, ia mengatakan bahwa :

“Ada 35 titik TPS atau tempat pengumpulan sementara setiap kelurahan ada 3-4 titik TPS” (R.E 5 oktober 2016).

Dari hasil wawancara dengan ke dua seksi bidang kebersihan dapat dianalisa bahwa di Kecamatan Somba Opu ada tempat pengumpulan atau TPS yang berjumlah 35 titik setiap kelurahan ada 3-4 TPS atau tempat pengumpulan. Melihat pertumbuhan penduduk yang sangat padat sebaiknya pemerintah menyediakan TPS setiap RT/RW sesuai dengan SNI Nomor 19-2454-2002 tentang tata cara pengelolaan sampah di pemukiman.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat berharap ada tempat penampungan agar sampah tidak dibuang dipinggir jalan atau tanah kosong karena masyarakat hanya membawa ke TPS apabila mobil pengangkut tidak datang mengambil sampahnya” (I.N 18 oktober 2016).

“Ada TPS atau pengumpulan tapi sampah dibawa kesana apabila sudah banyak didepan rumah karena di TPS juga sampah sering menumpuk dan masyarakat juga membayar 10 ribu perbulan untuk pengangkutan sampah di setiap rumah warga” (D.P 18 oktober 2016).

“Ada TPS atau tempat pengumpulan tetapi masyarakat biasa membakar sampah atau membawa ke TPS apabila sampah didepan rumah sudah banyak karena di TPS juga sampah biasanya menumpuk” (S.H 19 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dapat dianalisa bahwa di Kecamatan Somba Opu ada TPS atau tempat pengumpulan tetapi masyarakat masih ada yang membuang sampah dipinggir jalan atau tanah kosong ada juga yang baru membawa sampah ke TPS apabila sampah didepan rumah sudah banyak karena masyarakat sudah terbiasa menyimpan sampah didepan rumah untuk menunggu mobil pengangkut sampah. Masyarakat juga biasa membakar sampahnya.

Berikut juga wawancara peneliti dengan petugas kebersihan, Ia mengatakan bahwa

“Ada 35 titik TPS yang sudah disediakan tapi masyarakat masih sering membuang sampah di pinggir jalan, selokan dan tanah kosong. ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik” (D.M 19 oktober 2016).

“Ada 35 titik TPS di Kecamatan Somba Opu ada 3-4 titik TPS setiap kelurahan, tetapi masyarakat kadang membuang di TPS atau menyimpan didepan rumah untuk menunggu mobil pengangkut” (D.O 19 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas kebersihan dapat dianalisa bahwa di Kecamatan Somba Opu ada 35 titik TPS atau tempat pengumpulan sementara dan setiap kelurahan ada 3-4 TPS tetapi masyarakat masih ada yang sering membuang sampah di pinggir jalan, selokan dan di tanah kosong ada juga yang menyimpan sampahnya didepan rumah menunggu mobil pengangkut datang. Sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi atau memasang papan peringatan agar tidak membuang sampah sembarang karena dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kerjasama masyarakat dengan pemerintah agar tercipta masyarakat bersih, sehat dan bebas sampah.

#### c. Pemandahan

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan kedalam alat pengangkutan untuk dibawa ketempat pembuanganakhir.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan seksi bidang kebersihan yang mengatakan bahwa :

“Sebelum sampah diangkut dan dibawa ke TPA sampah dipindahkan dari TPS ke mobil pengangkut atau motor gandeng oleh petugas kebersihan”(M.A 5 oktober 2016).

“Sampah dipindahkan dari TPS ke mobil pengangkut ataupun motor gandeng sebelum dibawa ke TPA oleh petugas kebersihan” (R.E 5 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seksi bidang kebersihan dapat dianalisa ke dua Informan seksi bidang kebersihan mengatakan hal yang sama bahwa proses pemindahan dilakukan oleh petugas kebersihan yaitu dipindahkan dari TPS ke mobil pengangkut ataupun motor gandeng untuk dibawa ke TPA dan ini sudah sesuai dengan SNI nomor 19-2454-2002 tentang pengelolaan sampah.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Sebelum diangkut sampah dipindahkan oleh petugas kebersihan dari depan rumah masyarakat ke mobil pengangkut sampah” (I.N 18 oktober 2016).

“Sampah dipindahkan dari depan rumah warga ke mobil pengangkut atau motor gandeng oleh petugas kebersihan tetapi tidak setiap hari” (D.P 18 oktober 2016).

“Sampah dipindahkan dari depan rumah warga ke mobil pengangkut oleh petugas kebersihan tetapi tidak setiap hari tergantung kapan datangnya petugas kebersihan” (S.H 19 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dapat dianalisa bahwa Sebelum sampah diangkut sampah dipindahkan ke mobil ataupun motor gandeng dari depan rumah masyarakat tetapi tidak dilakukan

setiap hari. Hampir sama dengan apa yang dikatakan masyarakat dan petugas kebersihan yang mengatakan bahwa :

“Sampah dipindahkan dari TPS atau didepan rumah masyarakat kemobil pengangkut sebelum dibawa ke TPA oleh petugas kebersihan” (D.M 19 oktober 2016).

“Sampah dipindahkan dari TPS atau didepan rumah masyarakat kemobil pengangkut sebelum dibawa ke TPA oleh petugas kebersihan ” (D.O 19 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kebersihan dapat dianalisa bahwa apa yang dikatakan masyarakat sama dengan apa yang dikatakan oleh petugas yaitu sampah dipindahkan dari TPS atau didepan rumah masyarakat ke mobil pengangkut atau motor gandeng untuk dibawa ke TPA dan sudah sesuai dengan SNI Nomor 19-2454-2002 .

#### d. Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Adapun wawancara peneliti dengan seksi bidang kebersihan yang mengatakan bahwa :

“Pengangkutan dilakukan dengan mengambil sampah di TPS setiap hari oleh petugas kebersihan mulai dari pukul 06:00 sampai sore pukul 17:00 Jumlah armadanya yaitu mobil pengangkut yang berjumlah 29 unit dan motor gandeng 13 unit” (M.A 5 oktober 2016).

“Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari oleh petugas kebersihan. Jumlah armadanya yaitu 29 mobil pengangkut, 13 unit motor gandeng” (R.E 5 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seksi bidang kebersihan dapat dianalisa bahwa kedua seksi bidang kebersihan mengatakan hal yang sama yaitu pengangkutan dilakukan dengan mengambil sampah di TPS setiap hari kemudian di bawa ke TPA oleh petugas kebersihan mulai dari pukul 06:00 sampai sore pukul 17:00. Jumlah armadanya yaitu 29 unit mobil pengangkut dan 13 unit motor gandeng.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat membayar 10 ribu perbulan untuk pengangkutan sampah di depan rumah tapi pengangkut sampah hanya datang 3 kali seminggu akibatnya masyarakat biasa membawa sampah kejalan raya” (I.N 18 oktober 2016).

“Masyarakat membayar 10 ribu perbulan untuk pengangkutan sampah yang diambil langsung depan rumah warga oleh petugas kebersihan, namun itu tidak setiap hari biasanya hanya 3 kali seminggu” (D.P 18 oktober 2016).

“Masyarakat membayar 10 ribu perbulan untuk pengangkutan sampah didepan rumah oleh petugas kebersihan dan dilakukan hanya 3 kali seminggu” (S.H 19 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dapat dianalisa bahwa masyarakat membayar 10 ribu perbulan untuk pengangkutan sampah didepan rumah tetapi pengangkutan hanya 3 kali dalam seminggu akibatnya masyarakat biasa membawa sampahnya ke jalan raya untuk dibuang. Sebaiknya sampah di angkut setiap hari sesuai dengan SNI Nomor 19-2454-2002 agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan atau membawanya ke sungai untuk dibuang.

e. Pembuangan

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan seksi bidang kebersihan yang mengatakan bahwa :

“TPA berlokasi di Kecamatan Bajeng Desa Pabbentengang.”(M.A 5 oktober 2016).

“TPA atau tempat pembuangan akhir berlokasi di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng.”(R.E 5 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seksi bidang kebersihan dapat dianalisa bahwa kedua seksi bidang kebersihan mengatakan hal yang sama yaitu TPA atau tempat pembuangan akhir berlokasi di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Sama dengan apa yang dikatakan oleh seksi bidang kebersihan dengan petugas kebersihan, Ia juga mengatakan bahwa :

“TPA berada di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng, ” (D.M 19 oktober 2016).

“TPA atau tempat pembuangan akhir berada di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng.”(D.O 19 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas kebersihan dapat dianalisa bahwa TPA atau tempat pembuangan akhir berada di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sama dengan apa yang dikatakan oleh seksi bidang kebersihan sesuai dengan SNI Nomor 19-2454-2002 tentang pengelolaan sampah.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Tata Kelola Persampahan diKecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.**

### **a. Fakto Pendukung**

Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu. Berikut hasil wawancara peneliti dengan seksi bidang kebersihan yang mengatakan bahwa :

“Ada beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu, mobil pengangkut berjumlah, motor gandeng, TPS, dan TPA yang berlokasi di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng” (M.A 5 oktober 2016)

Hasil wawancara dengan salah satu seksi bidang kebersihan juga di benarkan oleh seksi bidang kebersihan yang lain yang mengatakan bahwa :

“Ada 4 faktor pendukung dalam pengelolaan sampah yaitu, mobil pengangkut berjumlah 29 unit, motor gandeng 13 unit, TPS 35 titik dan TPA yang berada di Kecamatan Bajeng desa Pabbentengang” (R.E 5 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seksi bidang kebersihan dapat di analisa bahwa faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu mobil pengangkut berjumlah 29 unit, motor gandeng 13 unit, TPS ada 35 titik dan TPA yang berlokasi di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng.

Sama dengan apa yang dikatakan oleh seksi bidang kebersihan petugas kebersihan juga mengatakan bahwa :

“faktor pendukungnya yaitu mobil pengangkut dan motor gandeng” (D.M 19 oktober 2016).

“faktor pendukungnya yaitu mobil pengangkut, motor gandeng, tempat pengumpulan dan tempat pembuangan akhir di Bajeng” (D.O 19 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas kebersihan maka dapat di analisa bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu mobil pengangkut, motor gandeng, TPS dan TPA yang berlokasi di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng.

## **b. Faktor penghambat**

Peran dinas PU dan petugas kebersihan dalam melakukan pengelolaan sampah terhadap Kecamatan Somba Opu tidak lepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Ada beberapa hambatan yang dihadapi.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan seksi bidang kebersihan yang mengatakan bahwa :

“Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, masalah transportasi pengangkut dan kurangnya tenaga kerja” (MA 5 oktober 2016).

“Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, masalah transportasi pengangkutan, dan kurangnya tenaga kerja” (R.E 19 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua seksi bidang kebersihan dapat dianalisa bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, masalah transportasi pengangkutan dan kurangnya tenaga kerja.

Adapun hasil wawancara dengan petugas kebersihan iya juga mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, masalah transportasi pengangkutan, dan kurangnya tenaga kerja” (D.M 19 oktober 2016).

“Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, masalah transportasi pengangkutan, dan kurangnya tenaga kerja. ” (D.O 19 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa apa yang dikatakan oleh seksi bidang kebersihan sama dengan apa yang dikatakan oleh petugas kebersihan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu : Kurangnya kesadaran masyarakat, masalah transportasi pengangkutan dan kurangnya tenaga kerja.

Adapun hasil wawancara dengan sekretaris camat Kecamatan Somba Opu yang mengatakan bahwa :

“Untuk pengelolaan sampah yang bertanggung jawab secara tugas pokoknya yaitu di dinas PU bidang kebersihan adalah yang bertugas untuk pengangkutan sampah untuk mengambil sampah dari rumah-rumah penduduk termasuk juga kantor, meskipun seperti itu peran pemerintah kecamatan dan kelurahan tidak lepas begitu saja karena harus mengontrol karena lurah dan camat sangat berperan untuk menertibkan termasuk juga untuk kebersihan diwilayahnya masing-masing apalagi Kecamatan Somba Opu, karena ini cerminan dari kecamatan lain yang ada di Kabupaten Gowa, Somba Opu adalah Ibu Kota Kabupaten. Jadi camat dan lurah sangat

berperan meskipun secara struktur didalam tugas pokoknya bidang kebersihan dinas PU untuk sementara ini. Tugas pemerintah kecamatan dan kelurahan yaitu memberikan himbauan memberitahukan kejawaran yang paling bawah termasuk RT, RW, masyarakat untuk senantiasa hidup bersih. Karena kondisi seperti ini tidak lepas dari masyarakat yang masih kurang sadar untuk kebersihannya termasuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengeluarkan sampahnya ketika naik angkutan umum baik sampah pembungkus permen, tisyu atau bahkan botol bekas tempat air mineral dia keluarkan dari mobil pribadinya, itu semua yang mau diubah” (E.P 3 oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris camat Somba Opu dapat di simpulkan bahwa yang mengelola sampah atau persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu Dinas PU bidang kebersihan meskipun begitu pemerintah kecamatan dan kelurahan tetap memberikan himbauan kepada jajarannya yang paling bawah seperti RT/RW, dan masyarakat untuk senantiasa hidup bersih dan tidak membuang sampah sembarangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tata kelola persampahan di Kecamatan Somba Opu dikelola oleh dinas PU bidang kebersihan. Tetapi hanya empat indikator yang terlaksana yaitu :  
(1) Ada 35 titik pengumpulan sampah di Kecamatan Somba Opu. Setiap kelurahan ada 3-4 titik pengumpulan  
(2) Pemindahan, yaitu sebelum sampah diangkut ke TPA petugas kebersihan terlebih dahulu memindahkan sampah dari tempat pengumpulan sementara (TPS) dan dari rumah-rumah warga ke mobil pengangkut atau motor gandeng. (3) Pengangkutan, pengangkutan sampah dilakukan dan dibawa ke TPA untuk dibuang oleh petugas kebersihan menggunakan armada pengangkut. (4) Pembuangan, sampah di bawa dan di buang di TPA yang berlokasi di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng. Meskipun pada kenyataannya pengelolaan sampah belum maksimal. Sesuai dengan Spesifikasi dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang pengelolaan sampah ada 5 indikator yaitu penampungan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan.
2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa :

a. Faktor pendukung

faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu mobil pengangkut yang berjumlah 29 unit dan motor gandeng 13 unit ini sudah sangat mendukung dalam proses pengangkutan sampah di Kecamatan Somba Opu dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang berjumlah 35 titik kemudian di buang ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng.

b. Faktor Penghambat

faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan juga kerjasama masyarakat dan pemerintah masih kurang sehingga masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Masalah transportasi pengangkutan dalam pengelolaan sampah yang masih sering terjadi termasuk kerusakan mesin serta kurangnya tenaga kerja/petugas kebersihan yang ada di Kecamatan Somba Opu sehingga dalam pengelolaan sampah masih kurang maksimal.

## **B. Saran Saran**

Dengan melihat kesimpulan tersebut diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini pihak Dinas PU bidang kebersihan dalam melaksanakan pengelolaan sampah harus sungguh-sungguh melaksanakan atau menerapkan apa yang telah menjadi indikator dalam Standar Nasional Indonesia tentang pengelolaan sampah yaitu : Penampungan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan.
2. Pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah kecamatan dan kelurahan harus lebih peka terhadap masalah pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa karena dilihat dari pemukiman di Kelurahan Sungguminasa masih banyak sampah yang bertumpukan dan berserekan di pinggir jalan masyarakat juga mengeluhkan karena tidak adanya penampungan yang diberikan oleh pemerintah.
3. Pemerintah yang terkait sebaiknya menerapkan beberapa karakteristik good governance diantaranya yaitu : partisipasi, akuntabilitas, dan responsif agar didalam pengelolaan sampah pemerintah dan masyarakat lebih peka dan bisa bekerjasama sehingga di Kecamatan Somba Opu sebagai Ibu Kota Kabupaten jauh dari kata sampah dan masyarakat bebas sampah agar menjadi contoh untuk Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Gowa.
4. Di perlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terkait baik itu dinas PU, pemerintah setempat dan masyarakat untuk saling berpartisipasi

dalam menjaga kebersihan, dan kesehatan lingkungan Kecamatan Somba Opu sebagai Ibu Kota Kabupaten dan menjadi contoh bagi Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa sehingga terwujudnya masyarakat bersih, sehat dan bebas sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswar, 1990, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Badan Standar Nasional Indonesia (BSN), 2002, *Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002, Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Chandra, Budiman, 2006, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Gelbert, 1996, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang
- Hartoyo, 1998, *Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Kota Jatim*, Bahan Seminar Nasional Penanganan Sampah Kota, Fakultas Teknik, Brawijaya, Malang
- Hermawan Y, 2005, *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Persepsi dengan Perilaku Ibu Rumah Tangga dalam Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan*, Bumi Lestari *Journal Of Environment* (Internet), [di Unduh 2016 April 29] <http://js.Unud.ac.id/index.php/bije.articel/view/2411/1639>
- Mardismo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Slamet, Juli Soemirat, 2004, *Kesehatan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta

Syafrudin dan Priyambada, 2001, *Pengelolaan Limbah Padat Perkotaan (Sampah)*,  
*Program Studi Teknik Lingkungan*, Fakultas Teknik Undp, Semarang

Syarifuddin dan Priyambada I.B.200, *Pengelolaan Limbah padat, semarang :*  
*fakultas teknik UNDIP*

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance Telah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia*, Surabaya

Widyatmoko dan SintoriniMoerdjoko, 2002, *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta

Widyatmoko, Dan SutororiniMoerdjoko, 2002, *Menghindari , Mengolah Dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta

### **Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, Nurul Asfirah lahir di Mamampang Sulawesi Selatan pada tanggal 29 September 1994 merupakan anak Pertama dari 5 (Lima) bersaudara dari pasangan Bapak Suratmi dan Ibu Rukmawati, penulis berkembang di Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, penulis menempuh pendidikan di SDN Balassuka Kecamatan Tombolo Pao pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006. Kemudian terdaftar sebagai siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Tombolo Pao pada tahun 2006 dan tamat tahun 2009. Kemudian melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Datarang pada Tahun 2009 dan tamat 2012. Kemudian pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan studi di tahun 2017 dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Persampahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”.